e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



# PERBUDAKAN DI KERAJAAN BONE PADA MASA PEMERINTAHAN RAJA LA MADDAREMMENG: 1631-1644

**Oleh:**
**Fatma**
**Fitriana**
**Syahrun**
**(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo)**

## Abstract

The objectives of this research are: (1) to explain the factor causing slavery. (2) to describe the form of slavery, and (3) to explain the effect of slavery in Bone Kingdom during the reign of King La Maddaremmeng in 1631-1644. (4) To explain the abolition of slavery in Bone Kingdom. The method used in this research was structural approach, namely: (1) topic selection, (2) source heuristics, (3) source verification, (4) source interpretation, and (5) historiography. The result of this study showed that: (1) slavery in Bone Kingdom was caused by three factors: war, economic, and heredity factor, (2) the form of slavery in Bone Kingdom consist of 3 divisions: slaves as merchandise, slaves as labor, and slaves as agricultural laborers, (3) there were three effects of slavery in Bone Kingdom during the reign of King La Maddaremmeng in 1631-1644 such as: effect to the nobility, effect to the society and the effect to the slaves, (4) the abolition of slavery in Bone Kingdom was caused by two things, namely the influence of Islam, and the decision of King La Maddaremmeng regarding the abolition of slaves. La Maddaremmeng, a King who embraced Islam and wanted to apply Islamic law thoroughly in the Kingdom of Bone during his reign, including the position of humans on earth all the same without any social stratification. King La Maddaremmeng created a decision to free all slaves owned by slave masters, except for hereditary slaves, but must also be treated according to humanity.

**Keywords:** Social Stratification, Slavery, and Leadership.

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan faktor penyebab perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. (2) Untuk mendeskripsikan wujud perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. (3) Untuk menjelaskan dampak perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. (4) Untuk menjelaskan penghapusan perbudakan di Kerajaan Bone. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan strukturis yaitu (1) Pemilihan topik. (2) Heuristik sumber. (3) Verifikasi sumber. (4) Interpretasi sumber. (5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perbudakan di Kerajaan Bone disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor perang, faktor ekonomi dan faktor keturunan. (2) Wujud perbudakan yang terjadi di Kerajaan Bone ada 3 (tiga) yaitu budak sebagai barang dagangan, budak sebagai hamba sahaya dan budak sebagai buruh tani. (3) Dampak perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644 ada 3 (tiga) yaitu dampak bagi bangsawan, dampak bagi masyarakat dan dampak bagi budak. (4) Penghapusan perbudakan di Kerajaaan Bone disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu pengaruh agama Islam dan keputusan Raja La Maddaremmeng tentang penghapusan budak. La Maddaremmeng merupakan raja yang menganut agama Islam dan berupaya menerapkan syariat Islam di Kerajaan Bone pada masa pemerintahannya. Raja La Maddaremmeng ingin menyamakan kedudukan manusia di muka bumi

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



tanpa ada stratifikasi sosial. Ia kemudian menetapkan keputusan untuk memerdekakan semua budak, kecuali budak turun temurun. Meski demikian para budak (turun temurun) tetap harus diperlakukan sesuai dengan perikemanusiaaan.

**Kata Kunci:** Stratifikasi Sosial, Perbudakan, Kepemimpian**.**

## 1. Pendahuluan

Sejarah lokal mempunyai domain garapan yang sangat luas dan beraneka ragam. Seperti persoalan ekonomi, budaya, politik, maupun sosial. Tema-tema sejarah lokal yang berkaitan dengan permasalahan sosial seperti perburuhan, dan perbudakan menjadi tema yang penting. Perbedaan latar belakang masyarakat menjadi penyebab adanya perbudakan.

Permasalahan perbudakan menjadi salah satu fenomena di Sulawesi Selatan pada masa lalu, seperti yang terjadi di Kerajaan Bone. Perbudakan di Kerajaan Bone muncul sebelum masuknya Islam. Hal ini berawal dari terjalinnya hubungan vertikal antara kalangan atas dan kalangan bawah. Meskipun ikatan ini tidak sejajar, namun mengandung pertukaran kepentingan yang timbal balik.

Kerajaan Bone terbentuk pada awal abad ke XIV atau pada tahun 1330. Namun, sebelum Kerajaan Bone terbentuk, sudah ada kelompok-kelompok dan pemimpinnya bergelar *matoa* (orang yang dituakan). Dengan datangnya To Manurung Mata Silompo'e, maka terjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut, termasuk Cina, Barebbo, Awangpone, dan Palakka. Pada saat pengangkatan To Manurung Mata Silompo'e menjadi Raja Bone, rakyat Bone bersumpah sebagai pertanda kesetiaan rakyat kepada raja, sekaligus sebagai pencerminan sifat pemerintahan Kerajaan di awal berdirinya (Patunru, 1989: 47).

Kerajaan Bone setelah memeluk agama Islam, mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Penerimaan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budaya masyarakat yang bersifat akomodatif dan toleran, sehingga agama Islam yang berkembang merupakan Islam yang toleran dan terbuka terhadap akulturasi budaya setempat yang berciri lokalitas Sulawesi Selatan (Abdullah, 2016: 92).

Matinro'e Ri Bukaka (Sultan Muhammad Saleh) merupakan sosok raja yang terkenal fanatik dalam ajaran agama Islam. Sikap fanatik tersebut tidak terlepas dari pengaruh Kerajaan Gowa. Pada masa itu hubungan yang terjadi antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan di sekitarnya sangat berdampak pada kehidupan sosial, agama, ekonomi dan budaya masyarakat di Kerajaan Bone (Kadril, 2018: 143).

Perbudakan merupakan sejarah yang belum banyak terungkap dan terkait dengan sejarah perbudakan di kawasan Timur, terkhusus di Sulawesi Selatan. Dalam sejarah perbudakan mencakup periode waktu yang lama dan mencakup berbagai bentuk perbudakan. Van Leeuw menjelaskan, "praktik perbudakan pertama kali dilakukan di Indonesia saat Jan Pieterszoon Coen membunuh semua penduduk asli pulau Banda untuk membuka perkebunan Pala". Penjajah Belanda membiarkan praktik perbudakan itu terus berlangsung karena itu menguntungkan posisi mereka di wilayah jajahan (Thosibo, 2002: 12).

Peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di Kerajaan Bone begitu banyak yang bersifat sejarah dan semestinya ditonjolkan sebagai sejarah lokal. Namun, pada kenyataannya penulisan mengenai sejarah lokal masih berada pada ruang cakupan yang luas sehingga sejarah lokal yang memiliki ruang lingkup khusus masih sulit di dapatkan. Fenomena perbudakan (hamba sahaya) dan fenomena "orang berutang", sebagai variannya, merupakan fenomena kemanusiaan yang layak untuk diteliti, baik dalam kaitannya dengan fenomena feodalisme, kolonialisme, ekonomi pasar, maupun fenomena kultural lain yang selalu melahirkan stratifikasi dan kelas-kelas sosial.

Penulis berpandangan bahwa perbudakan merupakan salah satu istilah yang cukup penting dalam analisis sosial. Pada saat mendefinisikan istilah perbudakan akan lebih penting lagi untuk

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



dapat mengetahui bahwa institusi perbudakan telah mencakup berbagai macam masyarakat yang ada pada masa lalu. Fenomena perbudakan yang terjadi di masa lalu, memiliki nilai penting pengajaran dan pengetahuan sejarah, khususnya di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng Tahun 1631-1644. Sejarah mengenai perbudakan dapat dilihat melalui konsep perbudakan, konsep actor, dan konsep kepemimpinan.

**a. Konsep Perbudakan**

Perbudakan adalah suatu kondisi seseorang yang disebut budak, melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Budak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Pemilik budak merupakan pemilik satu-satunya pihak yang mendominasi antara pemberi dan penerima pekerjaan. Pendefinisian budak dalam pengertian paling lazim dari kata ini sebagai seseorang yang menjadi hak milik pribadi orang lain. Secara politik dan sosial para budak berada di tingkatan lebih rendah dibanding kebanyakan orang dan melaksanakan kerja wajib (Reid, 2001: 241).

Budak ialah sekelompok manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa upah dan tidak mempunyai hak asasi manusia. Meski begitu, pemilik budak tidak bisa bersikap sewenang-wenang terhadap budak, karena penguasa memerlukan budak tidak hanya tenaga kerja tapi juga sebagai simbol status. Perbudakan adalah hal yang langka bagi penduduk pemburu-peramu, sebab perbudakan berkembang sebagai sistem stratifikasi sosial. Budak menempati posisi bawah, sedang penguasa berada diposisi atas. Penguasaan tenaga kerja dipandang sebagai petunjuk kekuasaan dan status yang menentukan, sebab tenaga kerjalah yang dikenal sebagai sumber daya langka.

Perbudakan merupakan suatu lembaga sosial yang seluruh hak dan sifat dasar kemanusiaan seseorang dikuasai mutlak oleh tuannya. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan dalam suatu kondisi. Makna budak adalah orang yang dianggap dan disamakan dengan barang milik (*property*), hak kemanusiaan sebagai hak dasar yang bersifat kodrati telah dirampas oleh orang lain (pemiliknya).

**b. Konsep Aktor**

Aktor dapat dipahami sebagai pelaku yang mengendalikan kondisi atau keputusan. Dalam struktur sosial yang mencakup ruang dan waktu dikendalikan oleh aktor-aktor individu yang menjadi subjek dan memiliki andil untuk mengontrol struktur dalam masyarakat. Aktivitas-aktivitas sosial diciptakan untuk mengekspresikan diri sebagai aktor atau pelaku yang tengah menjalankan kiprahnya. Wirawan (2015:215) menjelaskan bahwa aktor merupakan seseorang yang mewujudkan peran ke dalam realita. Sebagai seorang aktor tentu saja memiliki kemampuan untuk melakukan suatu hal yang menonjol di dalam suatu masyarakat. Peran seorang aktor diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Seorang aktor tentunya memiliki pengaruh penting dalam lingkungannya, yang memiliki keistimewaan sifat (Heddy, 2009: 27). Peran seorang aktor pada wilayah kekuasaan, dapat dilihat pada suatu wilayah yang diperintahnya. Seorang aktor menjadi pemegang kekuasaan, dalam hal kebijakan sehingga masyarakat menjadikan kebijakan tersebut sebagai tolak ukur dalam bertindak. Aktor disebut juga sebagai pemeran yang dapat mengendalikan lingkungannya dan biasanya memiliki sifat-sifat yang menonjol (kharismatik).

c. **Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan mengandung suatu pengertian kemampuan seseorang untuk menuntun atau membimbing orang lain baik secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena itu, kepemimpinan muncul bersama lahirnya kelompok atau organisasi. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain. Seorang pemimpin harus didasari oleh bakat, sifat dan pengalaman, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Sejalan dengan itu, munculnya seorang pemimpin dalam suatu masyarakat yang membangun karena ia memiliki sifat-sifat kharismatik. Sifat-sifat itu timbul

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



karena adanya kesaktian atau kekuatan luar biasa dan dianggap menurun sebagai warisan dari leluhurnya. Sehubungan dengan itu, bahwa "sebuah kepemimpinan tradisional adalah pemimpin yang tumbuh berdasarkan sejarah" (Uchjana, 1986: 32).

Kepemimpinan tradisional mencerminkan gaya kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepatuhan dan loyalitas, mengedepankan kepentingan orang lain (masyarakat), dan nilai toleransi yang tinggi, serta memberikan contoh yang baik kepada yang dipimpinnya dengan mengutamakan nilai-nilai moral di dalam masyarakat.

Penelitian ini dapat ditinjau dari teori stratifikasi sosial dan teori patron-klien. Teori Stratifikasi Sosial melihat bahwa penggolongan sosial merupakan perbedaan kedudukan atau adanya pelapisan kelas pada masyarakat secara bertingkat. Stratifikasi sosial di masyarakat ditentukan oleh sesuatu yang dihargai oleh masyarakat, dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan.

Stratifikasi sosial adalah pokok bahasan yang sering membuat sejarawan tergoda untuk menggunakan istilah-istilah teknis seperti "kasta", "mobilitas sosial" dan sebagainya. Singgih (2010: 24) menerangkan bahwa stratifikasi sosial merupakan fenomena universal dan dapat ditemukan di semua kelompok masyarakat. Stratifikasi sosial selalu berbentuk hierarki, di mana seseorang menempati posisi atas, sedangkan sebagian yang lain menempati posisi bawah.

Teori patron-klien melihat bahwa pertukaran hubungan antara kedua peran dapat dinyatakan sebagai ikatan yang melibatkan seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) untuk menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya.

Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi. Kondisi sosial pertama yang mendukung hubungan patron-klien, menurut Scott, adalah adanya perbedaan penguasaan atas kedudukan (status), kekuasaan, dan kekayaan. (Heddy, 2007: 83).

Penelitian ini dilaksanakan di ibu kota Kabupaten Bone yang terletak di Kota Watampone. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan di Perpustakaan Universitas Halu Oleo, Laboratorium Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UHO, perpustakaan IAIN Alauddin Makassar,dan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Sulawesi Selatan yang menyediakan sumber data yang berkaitan dengan data penulisan sejarah Perbudakan di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644.

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020, dengan estimasi waktu penelitian selama 3 bulan yaitu pada bulan pertama dilakukan persiapan keberangkatan untuk pencarian arsip yang berkaitan dengan Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. Bulan kedua dilakukan penelusuran arsip-arsip tentang Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644. Bulan ketiga dilakukan penulisan tentang Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial. Kartodirdjo (1993: 50) mengartikan sejarah sosial secara luas, menganggap setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok, dapat disebut sejarah sosial. Perkembangan sejarah sosial meliputi, sejarah perjuangan kelas pada umumnya dan berkaitan pada arti sejarah sosial sebagai sejarah gerakan sosial, antara lain mencakup gerakan serikat buruh, gerakan kaum sosialis, gerakan kaum nasionalis, gerakan emansipasi wanita, dan gerakan anti perbudakan.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan strukturis. Pendekatan strukturis yaitu menggabungkan dua domain yaitu domain peristiwa dan domain struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan analisis struktur dan peristiwa yang mengandung unsur-unsur yang senantiasa berulang dan berubah dalam kurun waktu yang panjang. Ciri-ciri pendekatan strukturis yaitu (1) yang dipelajari adalah struktur dan peristiwa dan (2) menjawab pertanyaan apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana dan mengapa.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah motode sejarah yang ditulis oleh Kuntowijoyo (2013: 69-80) yang terbagi dalam lima tahapan yaitu:

**a. Pemilihan Topik**

Pemilihan topik tentang perbudakan ini didasarkan atas 2 pertimbangan kedekatan yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual

**b. Heuristik Sumber**

Sumber Penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber tertulis, sumber lisan, sumber artefak (kebendaan). Studi sumber antara lain studi dokumen (*document research*), studi kepustakaan (*library research*), studi lisan (*oral research*), dan studi visual (*visual research*).

**c. Verifikasi Sumber**

Peneliti melakukan analisis data melalui kritik sumber yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, guna untuk mengetahui keaslian dan kebenaran data yang telah berhasil dikumpulkan. Sehubungan dengan ini maka dilakukan 2 bentuk kritik sumber yaitu:

a. Kritik Ekstern (kritik luar), yaitu peneliti melakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh pada instansi yang terkait khususnya mengenai perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng.
b. Kritik Intern (kritik dalam), yaitu peneliti menekankan pada aspek "dalam" yaitu isi dari sumber kesaksian (*testimoni*).

**d. Interpretasi Sumber**

Setelah melakukan kritik sumber atau data, maka selanjutnya data tersebut diinterpretasi atau memberikan penjelasan maupun penafsiran dengan mengacu pada konsep dan teori yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penafsiran data yang akan dilakukan dengan menghubung-hubungkan antara data yang satu dengan data lainnya sehingga diperoleh suatu fakta sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya secara ilmiah.

**e. Historiografi**

Penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menyusun sebuah kisah sejarah tentang perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng dalam bentuk karya tulis ilmiah secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari kegiatan interpretasi sumber.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### 2.1 Faktor Penyebab Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng : 1631-1644

Kerajaan Bone atau sering pula dikenal dengan *Akkarungeng ri Bone*, kerajaan yang besar dan kedudukan kuat yang melakukan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti , Luwu, Soppeng, Wajo, Gowa dan Mampu. Hal tersebut menempatkan Bone dalam posisi strategis dan bermartabat yang kuat terhadap kerajaan-kerajaan di kawasan Sulawesi Selatan. (Wawancara dengan Baso di Bone, 04 Januari 2020).

Struktur masyarakat kerajaan masih menggunakan stratifikasi sosial dalam membagi kedudukan masyarakat saat itu. Pada masa Kerajaan, misalnya di Kerajaan Bone dikenal dengan *Anakaruang* (anak raja-raja), *To-Maradeka (*orang bebas*)*, *Ata* (budak) (Palloge, 1990: 283-284).

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



Stratifikasi sosial dalam Kerajaan Bone menyebabkan terjadi pemusatan kekuasaan pada golongan atau kelompok masyarakat golongan atas yang dikenal sebagai kaum bangsawan dan dipimpin oleh seorang raja.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya budak di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644, yaitu:

**a. Faktor Keturunan**

Anak yang terlahir dari budak otomatis menjadi budak. Budak dimiliki oleh tuan dan harus mematuhi sang tuan, budak tidak boleh bekerja untuk orang lain juga tidak berhak menikah atau membesarkan anak tanpa izin sang tuan. Jika budak tidak patuh, maka pemilik budak berhak memukul atau tidak memberi makan serta dapat menjual budak kapan saja. Bentuk penghambaan diri seorang budak terhadap kerajaan atau seorang tuan tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Bone pada kekuatan gaib. Penghambaan tersebut berkaitan dengan kepercayaan di mana seorang hamba diwajibkan mengabdi terhadap pemiliknya. Di Kerajaan Bone, ternyata tasawuf juga ikut mewarnai sistem kekuasaan. Raja dianggap sebagai "manusia sempurna" sehingga dianggap mempunyai kewenangan melaksanakan apa saja karena selain sebagai raja, juga dianggap "*khalifah Allah"* (Wawancara dengan Najamuddin di Bone, 03 Januari 2020). Yang demikian itu menjadi tolak ukur seorang budak untuk mengabdi terhadap tuannya ataupun mengabdi di istana.

**b. Faktor Perang**

Pada zaman kerajaan di Sulawesi Selatan, peperangan antarkerajaan masih sering terjadi dengan berbagai alasan, termasuk di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. Dari peperangan salah satu dari kerajaan yang berperang akan kalah dan kerajaan yang satu akan memenangkan peperangan,akibatnya pasukan yang tertangkap akan ditawan dan dijadikan budak. Budak sebagian besar adalah anak-anak yang terlahir bebas namun dijual sebagai budak oleh orang tua, biasanya karena orang tua terlalu miskin dan tak mampu mengurus anak. Budak juga bisa berasal dari orang yang diculik atau tawanan perang.

Peperangan antarsuku, wilayah dan Negara juga sangat sering terjadi di zaman dahulu (kerajaan), bahkan peperangan juga bisa terjadi antardua kelompok yang berbeda kepentingan. Pihak yang kalah secara legal akan menjadi budak untuk pihak yang menang. Apabila peperangan tidak berakhir dengan kekalahan satu pihak, maka semua warga pihak yang tertawan akan menjadi budak bagi pihak yang menawannya (Nasution, 2002: 96).

**c. Faktor Ekonomi**

Budak pada masa kerajaan sama halnya dengan harta. Jika seseorang berada dalam kondisi kemiskinan dan berhutang kepada seseorang dan jika tidak dapat membayarnya maka si peminjan dijadikan budak. Karena budak bekerja guna mendapatkan kekayaan bagi tuan pemilik budak. Dalam menjalankan roda perekonomian, para bangsawan menjalankan usaha agraris (pertanian) yang dilaksanakan oleh para tuan tanah, dimana para tuan tanah memerintahkan para budaknya menggarap sawah dan ladang untuk bercocok tanam sesuai dengan apa yang diperintahkan tuan tanah. Hasil dari pertanian yang dijalankan diberikan sepenuhnya kepada tuan tanah, budak hanya diberi makan dan minum serta tempat tinggal (Wawancara dengan Najamuddin di Bone, 03 Januari 2020).

Satu jaringan pribumi yang menarik adalah jaringan yang berpusat di Makassar dan meluas ke seluruh Nusantara dari ujung timur ke ujung barat. Aktivitas perdagangan budak yang diangkut dengan kapal cenderung mengambil orang-orang dari timur ke barat (Thosibo, 2002: 120). Tidak diragukan lagi, perdagangan budak yang ada di Makassar juga diperoleh dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi, termasuk Kerajaan Bone yang para bangsawannya merupakan pemilik budak dengan jumlah yang mencukupi.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



## 2.2 Wujud Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644

Wujud atau bentuk perbudakan yang terjadi di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaemmeng, yaitu:

**a. Budak : Barang Dagangan**

Praktek perdagangan budak sebetulnya telah lama dijalankan jauh sebelum Belanda datang menaklukkan Sulawesi Selatan secara defintif pada tahun 1667. Kerajaan-kerajaan besar yang menang perang akan mendapat tawanan dari kerajaan yang kalah, selain dijadikan budak kerajaan, mereka juga dijual ke pulau-pulau seberang. Praktek perdagangan budak semakin merajalela seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi barang hasil pertanian maupun laut. Secara geografis, budak-budak yang dijual diambil dari pegunungan dibawah ke dataran rendah, dari kerajaan-kerajaan kecil ke kerajaan besar yang lebih kaya, dari masyarakat non-muslim ke masyarakat muslim (Kasma, 2017: 33).

Perdagangan budak menjadi komoditas yang sangat laku di pasaran dan Makassar merupakan tempat transit dari para pedagang budak di Sulawesi. Perdagangan budak di Kerajaaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644 dikarenakan ketersediaan budak yang cukup. Budak juga dianggap sebagai harta kepemilikan yang dapat mengukur status seseorang sehingga terjadilah perdagangan budak antar bangsawan di Kerajaan Bone maupun di luar Kerajaan Bone (Ali, 1980: 35).

**b. Budak : Hamba Sahaya/Ata**

Budak yang melakukan pekerjaaan sebagai bentuk pengabdian diri terhadap sang tuan atau pada kerajaan, budak dengan pengertian hamba sahaya pada masa kerajaan biasa juga disebut budak turun temurun (Keturunan), yang melakukan pelayan istana, penjaga kerajaan, dayang-dayang, penata rambut, koki, pengasuh anak, penari, pengrajin, dan mengambil air secara rutin di sumur atau sungai. Mereka dipandang memiliki status rendah, para budakpun dapat dengan mudah digantikan atau dibunuh tanpa menimbulkan kehebohan (Wawancara dengan Najamuddin di Bone, 03 Januari 2020).

**c. Budak : Buruh Tani**

Budak sebagai buruh tani yaitu budak yang dipekerjakan oleh tuannya/pemilik tanah untuk mengolah ladang, membajak sawah, menanam dan memanen padi, jagung dan hasil ladang sesuai perintah sang tuan. Kebanyakan budak laki-laki yang bekerja sebagai buruh tani sedangkan budak perempuan bekerja mengolah kulit atau juga menenun (Wawancara dengan Najamuddin di Bone, 03 Januari 2020).

Perubahan dan perkembangan Kerajaan Bone serta rakyatnya berada dalam kondisi yang jelas dan lebih nyata struktur dan tata kendali kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Walaupun karena kondisi, situasi dan keadaan sedemikian rupa pula, perbudakan di Kerajaan Bone berlangsung terus, sungguhpun tidak lagi seperti dahulu (Wawancara dengan Baso di Bone, 04 Januari 2020). Kini perbudakan yang terjadi di Kerajaan Bone dahulu tidak lagi seperti sekarang ini. Namun jauh lebih modern yang pekerja tetap memiliki tuan.

## 2.3 Akibat Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644

**a. Bagi Kaum Bangsawan**

Hadirnya perbudakan di Kerajaan Bone membuat kedudukan atau status sosial seorang bangsawan semakin menguat, para bangsawan berlomba-lomba untuk memperbanyak kepemilikan budak. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan budak oleh para bangsawan membawa keuntungan bahwa budak juga menjadi tolak ukur status seorang tuan, semakin banyak budak yang dimiliki

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



maka semakin tinggi status seorang tuan. Bahkan Ibunda Raja La Maddaremmeng yang bernama We Tenrisoloreng yang digelar Makkalarue Datu Pattiro memiliki ratusan budak. Di masa pemerintahannya (1631-1644) Raja La Maddaremmeng ingin membela nasib sesama manusia yang malang itu sesuai dengan ajaran Islam (Patunru, 1989: 119).

Bangsawan memiliki budak dan mempekerjakan budak guna mendapatkan kekayaan bagi tuan pemilik budak. Dalam menjalankan roda perekonomian, para bangsawan menjalankan usaha agraris (pertanian) yang dilaksanakan oleh para tuan tanah, dimana para tuan tanah memerintahkan para budaknya menggarap sawah dan ladang untuk bercocok tanam sesuai dengan apa yang diperintahkan tuan tanah. Hasil dari pertanian yang dijalankan diberikan sepenuhnya kepada tuan tanah, budak hanya diberi makan dan minum serta tempat tinggal (Wawancara dengan Najamuddin di Bone, 03 Januari 2020).

**b. Bagi Budak**

Sebagai buruh tani, budak dipekerjakan oleh tuan tanah atau budak bekerja khusus untuk menyuplai makanan pokok di Istana Kerajaan Bone. Budak hanya diberi makan dan minum sebagai upah untuk bertahan hidup. Perbudakan juga membawa akibat yang merugikan terhadap budak itu sendiri yaitu budak dapat disuruh bekerja sekeras-kerasnya tanpa sesuatu bayaran, asal diberi makan untuk dapat hidup guna dipergunakan tenaga badannya, tak ubahnya seperti hewan piaraan. Malahan budak-budak wanita boleh digauli oleh tuannya sesuka hati. Suatu kejadian biasa bahwa bapak, ibu dan anak dari suatu keluarga budak dicerai beraikan, karena salah seorang dari mereka dijual atau digadaikan oleh tuannya kepada orang lain. Membunuh budak milik sendiri tak ada hukumnya (Patunru, 1989: 118-119).

Budak yang melakukan pekerjaaan sebagai bentuk pengabdian diri terhadap sang tuan atau pada Kerajaan, budak tidak selalu dalam konotasi yang negatif pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644 di Kerajaan Bone, karena sudah jelas bahwa perbudakan yang terjadi di Kerajaan Bone juga merupakan kelas dalam stratifikasi sosial, dimana budak dalam hal ini golongan bawah pada pelapisan sosial. Hal ini dikarenakan sesuatu hal, seperti: tawanan perang yang kemudian jadikan oleh pihak yang memenangkan perang, sebab utang dan juga dikarenakan keturunan.

Hadirnya perbudakan memunculkan stratifikasi sosial dalam masyarakat Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644. Stratifikasi sosial yakni penggolongan sosial atau adanya perbedaan kedudukan/ pelapisan kelas pada masyarakat secara bertingkat yakni golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah.

## 2.4 Penghapusan Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644

**a. Pengaruh Agama Islam**

Perbudakan yang terjadi di Kerajaan Bone pada periode 1631-1644 yang merupakan masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng. La Maddaremmeng merupakan raja yang menganut agama Islam dan berupaya menerapkan syariat Islam termasuk kedudukan manusia di muka bumi semua sama tanpa ada stratifikasi sosial. Sang Raja memberi perintah untuk memerdekakan semua budak yang dimiliki oleh tuan budak, kecuali budak turun temurun, namun juga harus diperlakukan sesuai dengan peri kemanusiaaan.

Ketika Islam muncul, perbudakan merupakan masalah umum dan merupakan penopang sistem ekonomi dan sosial di seluruh jazirah Arabia bahkan di seluruh belahan dunia. Ironisnya tidak ada orang yang berpikir untuk mengakhirinya karena berpikir mengakhiri perbudakan akan menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat dari seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut mengingat bahwa perbudakan sudah dianggap sebuah realitas hidup yang sudah diterima di semua lapisan masyarakat dunia (Nasution, 2002: 95). Namun tidak dengan Raja Bone ke XIII La

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



Maddaremmeng yang secara terang-terangan menentang perbudakan serta menetapkan penghapusan budak di Kerajaan Bone.

Syiar Islam yang dilakukan oleh La Maddaremmeng sebagai Raja Bone XIII cukup giat. Ia terkenal gigih membentuk pemerintahan yang berbasis Islam dan terbukti pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Ajaran Islam di Kerajaan Bone berpengaruh di kalangan bangsawan dan kalangan orang kebanyakan (merdeka), lain halnya dengan kalangan budak. Sebagaimana diketahui bahwa budak adalah seseorang yang dimiliki dan tidak memiliki kebebasan.

Proses pemurnian agama Islam memerlukan waktu yang lama dan tidak dapat dilakukan secara instan. Hal tersebut karena kepercayaan nenek moyang masyarakat Kerajaan Bone masih melekat pada saat Islam masuk. La Maddaremmeng merupakan seorang raja yang dikenal sangat patuh terhadap aturan Islam sebagaimana yang tercantum dalam Lontarak, sebagai berikut :

> *Iyatonaé Arung mangkau' ri aseng maséro magama. Na maraja pakkamase ri padanna winru' ri Allah Ta'ala* (NR 21 4-5).

Artinya:

> Inilah raja yang berkuasa yang dikenal religius, lagi tinggi kasih sayangnya sesama ciptaan Allah SWT (NR 21 4-5).

Masa pemerintahan La Maddaremmeng nasib budak (pekerja) khususnya di Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya memprihatinkan karena tidak sesuai keyakinan yang dianut yaitu Islam (Patunru, 1989: 118-119). Budak dapat disuruh bekerja sekeras-kerasnya tanpa bayaran, dan tidak memiliki kebebasan atas melakukan sesuatu tanpa perintah tuan. Bahkan membunuh budak milik sendiri tidak ada hukumnya. Namun Arumpone La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh sangat semangat menerapkan syariat Islam dan menentang perbudakan.

Raja La Maddaremmeng ialah seorang Raja yang menganut agama Islam dan ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di Kerajaan Bone pada masa pemerintahannya, termasuk kedudukan manusia dimuka bumi semua sama tanpa ada stratifikasi sosial. Raja La Maddaremmeng menetapkan keputusan untuk memerdekakan (membebaskan) semua budak yang dimiliki oleh tuan budak, kecuali budak turun temurun, namun juga harus diperlakukan sesuai dengan peri kemanusiaan (Palloge, 1990: 111-112).

**b. Keputusan Raja La Maddaremmeng**

Raja La Maddaremmeng mengeluarkan perintah untuk tidak lagi mempekerjakan budak (*ata*), karena semua umat Islam adalah orang yang merdeka. Bila seseorang mempekerjaan budak maka harus memperoleh nafkah sewajarnya. La Maddaremmeng juga menghukum berat para penyembah berhala atau menyakralkan tempat dan benda-benda tertentu, pelaku zina, pencurian, miras, dan berbagai bentuk kemungkaran yang terjadi di wilayah pemerintahannya. La Maddaremmeng merupakan Raja Bone yang menerapkan syariat Islam secara formal di Bone dan daerah sekitarnya (Palloge, 1990: 109).

Sebagaimana dalam lontarak disebutkan bahwa :

> Iyana (La Maddaremmeng) mapparéntangngi ri to Boné pamaradékai sininna ata riyalaé ri laleng musu' kuwaé topa sininna ata riduiriyé. Iya muwasa' ata mana'é manennungeng wedding mui ripowata naé riyagi lise' bolai padatosa' séajingngé (NR 21 4-5).

Artinya:

> Inilah (La Maddaremmeng) yang memerintahkan kepada masyarakat Bone untuk memerdekakan seluruh sahaya yang diambil dalam peperangan, juga seluruh sahaya yang dibeli. Adapun sahaya warisan yang telah lama mangabdi dibolehkan dijadikan sahaya, tetapi harus diperlakukan manusiawi sebagaimana perlakuan terhadap keluarga sendiri (NR 21 4-5).

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



Perintah atau ketetapan Raja La Maddaremmeng tentang "larangan perbudakan" bahwa semua hamba sahaya harus dimerdekakan, kecuali hamba warisan. Budak yang dipekerjakan harus diberi upah yang sama dengan pekerja. Ketetapan "larangan perbudakan" dikenakan pada semua bangsawan, penguasa daerah dan pemilik budak tanpa kecuali. Keputusan tersebut mendapat tentangan dari para petinggi kerajaan, bangsawan dan penguasa daerah. Para penentang menganggapp budak sebagai satu-satunya kekayaan yang dapat bekerja di persawahan dan melakukan pekerjaan produktif lainnya (Ali, 1980: 33-34).

La Maddaremmeng mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya penghapusan budak karena raja-raja sebelumnya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang serupa. Sang Raja juga berupaya memurnikan agama Islam di mana masyarakat masih banyak mencampuradukkan antara agama dan budaya lokal. Semua hal tersebut dilakukan oleh La Maddaremmeng untuk meningkatkan kualitas keagamaan di Kerajaan Bone. Namun tidak semua jalan yang ditempuh berjalan dengan mulus, La Maddaremmeng dalam menjalankan kebijakannya banyak mendapat tantangan. Keputusan tersebut mendapat tantangan internal di antaranya berasal dari We Tenrisoloreng (Ibu La Maddaremmeng) yang tidak sepakat dengan kebijakan sang anak.

Raja Bone La Maddaremmeng tetap teguh menjalankan syariat Islam, padahal dalam sejarah Kerajaan Bone menerima Islam karena diperangi oleh Kerajaan Makassar pada tahun 1611 M. Namun ketika Raja Bone berusaha menjalankan syariat Islam ia malah ditentang kembali oleh Kerajaan Gowa, maka Gowa pada saat itu dianggap berkhianat kepada Kerajaan Bone (Wawancara dengan Najamuddin di Bone, 03 Januari 2020). Gowa kemudian dianggap berkhianat karena membantu menentang keputusan Raja Bone La Maddaremmeng tentang penghapusan perbudakan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Daerah Cimpu merupakan tempat dimana pasukan La Maddaremmeng mengalami kekalahan yang dikenal dengan *Beta Ri Cimpu* (kekalahan di Cimpu). Setelah pasukan Raja La Maddaremmeng mundur karena kekalahan, akhirnya La Maddaremmeng ditawan oleh pasukan gabungan di Gowa dan diasingkan di Gowa (Palloge, 1990: 113). Raja La Maddaremmeng mempertaruhkan diri dan kekuasaannya demi menegakkan syariat Islam di Kerajaan Bone sehingga mengalami kekalahan dan akhirnya ditawan.

Pasukan Kerajaan Gowa kemudian mengadakan lagi serangan besar-besaran untuk menumpas perlawanan rakyat Bone di bawah pimpinan Raja To Senrima. Raja To Senrima yang mendapat bantuan dari pihak keluarga yang berdiam di Kerajaan Soppeng antara lain keluarga La Tenritatta (Patunru, 1989: 119-120). Kerajaan Soppeng merupakan kerajaan yang letak geografisnya berbatasan dengan Kerajaan Bone sehingga bantuan dari Soppeng bisa lebih cepat tiba di Bone dibanding daerah lainnya.

Peperanganpun terjadi, pasukan Kerajaan Bone di bawah pimpinan Raja La Tenroaji To Senrima terus mengadakan perlawanan. Tetapi di akhir perang, pasukan Kerajaan Bone mengalami kekalahan di Pasempe yang dikenal dengan sebutan *Beta Ri Pasempe* (kekalahan di Pasempe). Sejak kekalahannya, Raja La Tenroaji To Senrima menjadi tawanan perang bersama keluarga La Tenritatta dari Soppeng (Ali, 1980: 34-35).

Kekalahan pasukan Kerajaan Bone dibawah pimpinan Raja La Tenroaji To Senrima di Pasempe, mengakibatkan Kerajaan Bone sepenuhnya dikuasai/dijajah oleh Kerajaan Gowa. Sejak tahun 1644 Kerajaaan Bone di bawah kekuasaan Gowa dengan ditempatkannya *Jennang* (pengawas) perwakilan dari Kerajaan Gowa di Kerajaan Bone sampai pada masa pemerintahan Raja La Tenritatta tahun 1646 (Ali, 1980: 35). Sejak saat itu, rakyat Bone dikatakan diperbudak oleh Gowa dikarenakan ketika Gowa membutuhkan tenaga kerja kasar maka tenaga pekerjanya diambil dari Kerajaan Bone, seperti pada saat pembangunan benteng Somba Opu.

Kemudian muncul *Jennang* yang bertugas untuk mengawasi pergerakan di Kerajaan Bone agar tidak ada lagi perlawanan yang mengganggu keamanan Kerajaan Gowa. Para budak yang ada

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



di Kerajaan Bone dibawa ke Makassar untuk pembangunan benteng juga untuk dijual. Bahkan bangsawan yang berani menentang kedudukan *Jennang* di wilayah Kerajaan Bone akan dibawa ke Makassar untuk dipekerjakan pada pembangunan benteng di Gowa dengan cara kerja paksa dan disiksa (Wawancara dengan Baso di Bone, 04 Januari 2020).

## 3. SIMPULAN

1. Perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644 dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: (a) Faktor keturunan, yaitu anak yang terlahir dari budak otomatis menjadi budak. (b) Faktor perang, yaitu pada zaman kerajaan di Sulawesi Selatan, peperangan antarkerajaan masih sering terjadi dengan berbagai alasan, termasuk di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644. Dari peperangan yang terjadi pihak yang kalah perang ditangkap dan ditawan menjadi budak. (c) faktor ekonomi, yaitu jika seseorang berada dalam kondisi kemiskinan dan berhutang kepada seseorang yang lebih darinya dan jika tidak dapat membayarnya maka si peminjam dijadikan budak.
2. Wujud perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644 ada 3 (tiga) yaitu: (a) Budak sebagai barang dagangan yaitu perdagangan budak yang terjadi di Kerajaaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644 dikarenakan ketersediaan budak yang cukup dan budak juga dianggap sebagai harta atau suatu kepemilikan yang dapat mengukur status. (b) Budak sebagai hamba sahaya yaitu budak yang melakukan pekerjaaan sebagai bentuk pengabdian diri terhadap sang tuan atau pada kerajaan. (c) Budak sebagai buruh tani yaitu budak yang dipekerjakan oleh tuannya/pemilik tanah untuk mengolah ladang, membajak sawah, menanam dan memanen padi, jagung dan hasil ladang sesuai perintah sang tuan.
3. Akibat perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644 berdasarkan temuan peneliti ada 3 (tiga) yaitu: (a) Bagi kaum bangsawan yaitu adanya perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644 membuat kedudukan atau status sosial seorang bangsawan semakin menguat, para bangsawan berlomba-lomba untuk memperbanyak kepemilikan budak karena merupakan alat pengukur status. (b) Bagi masyarakat yaitu adanya perbudakan memunculkan stratifikasi sosial dalam masyarakat Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644, hal ini menimbulkan 2 (dua) sikap yang berbeda pada masyarakat yakni ada yang suka dan tidak suka. (c) Bagi budak yaitu perbudakan juga membawa akibat yang merugikan terhadap budak itu sendiri yaitu budak dapat disuruh bekerja sekeras-kerasnya tanpa sesuatu upah.
4. Penghapusan perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644 disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu: (a) Pengaruh ajaran Islam, Raja La Maddaremmeng pada masa pemerintahannya menetapkan syariat Islam di Kerajaan Bone, sehingga tradisi dan kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam dihilangkan termasuk budak. Aturan tersebut dikecualikan pada budak turunan yang bertugas mengabdikan diri di istana Kerajaan Bone. (b) Keputusan Raja La Maddaremmeng untuk membebaskan budak akhirnya menghilangkan perbudakan di Kerajaan Bone. Keputusan tersebut mendapat banyak tantangan hingga terjadi peperangan antara Ibunda La Maddaremmeng yang mendapat bantuan dari Kerajaan Gowa dengan La Maddaremmeng sebagai Raja Kerajaan Bone pada tahun 1631-1644.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ansar. 2016. *Islamisasi Sulawesi Selatan; Perspektif Sejarah Islam.* Makassar: Aksara Timur.

Ali, Muhammad. 1980. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Nas Media Pustaka.

Amin, Kasma. 2017. *Para Tawanan Perang*. Cikarang :Gramedia Printing.

Hadrawi, Muhlis. 2018. *Lontara Sekke' Bone*. Makassar: Ininnawa.

Heddy, Putra. 2009. *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya.* Yogyakarta: UGM Perss.

_____ 2007.*Patron dan Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Kepel Press.

Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

_____ 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Keraf, Gorys. 1994. *Komposisi.* Jakarta: Nusa Indah.

Palloge, Andi. 1990. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Gowa: Yayasan Al Muallim.

Patunru, Daeng. 1989. *Sejarah Bone.* Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Sarwono, Wirawan. 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial.* Jakarta: Rajawali Perss.

Swansburg, Russel. 2000. *Pengantar Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan.* Jakarta: EGC.

Thosibo, Anwar. 2002. *Historiografi Perbudakan, Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*. Magelang: Indonesia Tera.

Hasan, Hasni. 2013. *Perdagangan Budak di Buton Abad XVII-XIX*. Skripsi Tidak Diterbitkan.Kendari.Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo.

Kartini, Eka. 2013. *Tradisi Barzanji Masyarakat Bugis di Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone SULSEL.* Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar .Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hamsah, Ustadi. 2010. *Perbudakan Sebelum Islam.* Skripsi Tidak Diterbitkan. Bone.Jurusan Sejarah IAIN Watampone.

Husain, Isra. 1983. *Studi Tentang Penyebaran Dan Perkembangan Agama Islam Di Bantaeng*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar.Fakultas Ilmu Budaya IAIN Alauddin Makassar.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828



Kadril, Muhammad. 2018. *Pengembangan Syiar Islam di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan La Maddaremmeng Tahun 1625-1644.* Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar.Fakultas Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kaharuddin. 2010. *Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan La Maddaremmeng, 1625-1644*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar.Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Makassar.

Ridha, Ahmad. 2013. *Islamisasi Kerajaan Bone*. Tesis Tidak Diterbitkan.Makassar.Jurusan Sejarah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sewang, Ahmad M. 2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII*: Disertasi Tidak Diterbitkan. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Singgih, Doddy. 2010. *Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. Surabaya. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jurusan Sosiologi Universitas Airlangga.

http://Journal.UIN.ac.id/95/Ahmad Sayuti Nasution. 2002. *Perbudakan dalam Hukum Islam.*Diakses hari Rabu, 26 Februari 2020.Pukul 20.25.

http://journal.uin-alauddin.ac.id/Abdul Hakim Wahid. 2015. *Perbudakan dalam Pandangan Islam.*Diakses hari Rabu, 26 Februari 2020. Pukul 19.15.